



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. IRFANI HENDRI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN DAN UMUM
3. NHK : 94008

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **580.000.000**

1. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 224 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **117.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA GENIO SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO /125 CC SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **18.750.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **636.484.545**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 100.000

Sub Total

Rp. 1.352.834.545

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.352.834.545

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.